



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
SMP KABUPATEN PROBOLINGGO
TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: **8.11.1/UN32.29/DN/2023**
NOMOR: **013 /MGMP.PPKn/SMP/x1/2023**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH, Kepala UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 24.11.2/UN32/KP/2022 tanggal 24 November tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Andi Prasetyo, S.Pd., Gr., Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMP Kabupaten Probolinggo**, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Nomor: 420/56/426.101/2022 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMP Kabupaten Probolinggo, berkedudukan di Jl. Raya Bayeman Tongas selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMP Kabupaten Probolinggo yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMP Kabupaten Probolinggo dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 8.11.1/UN32.29/DN/2023 dan Nomor 013/MGMP.PPKn/SMP/XI/2023 tentang Kerjasama Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang merupakan salah satu unit pelaksana teknis bidang pengembangan dan pengelolaan Laboratorium Pancasila yang bertugas melaksanakan pengembangan dan pengkajian Pancasila.
- (2) Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKn SMP (selanjutnya disingkat dengan MGMP PPKn) SMP Kabupaten Probolinggo merupakan perkumpulan guru mata pelajaran PPKn SMP di wilayah Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- (2) Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (3) Forum Ilmiah; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Perjanjian** ini disusun dengan maksud mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) **Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menginformasikan kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab bersama **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan.

PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) Tempat kegiatan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**, disesuaikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaksanaan.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan yang disepakati.
- (4) **PARA PIHAK** agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan, pelatihan, dan lain-lain yang maksimal sesuai yang diharapkan.
- (5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan dalam **perjanjian** kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dalam **perjanjian**; dan
- (7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (8)



PASAL 8 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan **perjanjian** ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak ada yang merasa dirugikan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Kepala UPT Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang



Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH

NIP 198103062008122001

PIHAK KEDUA

Ketua MGMP PPKn SMP
Kabupaten Probolinggo



Andi Prasetyo, S.Pd., Gr.

NIP 198806202022211009

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

